



ANCAMAN RADIKALISME TERHADAP KEAMANAN NASIONAL DALAM PERSPEKTIF INTELEJEN

Riki Gunawan¹⁾, Desi Albert Mamahit²⁾, Untung Hartono³⁾,

Teuku Rezasyah⁴⁾, Arya Dewa Nugroho⁵⁾

^{1,2,3,4)}Prodi Manajemen Pertahanan, Fakultas Manajemen Pertahanan,

Universitas Pertahanan

⁵⁾Ketahanan Energi, Manajemen Pertahanan,

Universitas Pertahanan

Abstrak

Fenomena radikalisme di Indonesia menjadi perhatian serius bagi keamanan dan stabilitas nasional. Artikel ini akan membahas tentang bahaya radikalisme di Indonesia dari perspektif intelejen dan keamanan nasional. Radikalisme di Indonesia memiliki dampak negatif bagi masyarakat dan sering kali diikuti dengan aksi teror yang dapat merugikan banyak orang. Intelejen berperan penting dalam mencegah dan mengatasi radikalisme dengan mengumpulkan informasi dan data terkait dengan kelompok-kelompok radikal. Keamanan nasional juga memiliki peran penting dalam mencegah radikalisme, dengan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta mengatasi aksi teror yang dilakukan oleh kelompok-kelompok radikal. Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan study literatur tentang peran intelejen dan keamanan nasional dalam mencegah dan mengatasi ancaman radikalisme di Indonesia.

Kata Kunci: Grafit, Elektrifikasi, Baterai, Industri Pertahanan.

PENDAHULUAN

Radikalisme telah menjadi ancaman serius bagi keamanan nasional Indonesia dalam beberapa tahun

terakhir. Radikalisme adalah paham atau ideologi yang mencoba untuk merubah struktur sosial dan politik yang sudah ada, dan cenderung dengan

*Correspondence Address : rikigunawan048@gmail.com

DOI : 10.31604/jips.v10i10.2023. 4833-4840

© 2023UM-Tapsel Press

menggunakan cara kekerasan (Nurlaila, 2018).

Di Indonesia, radikalisme biasanya dikaitkan dengan kelompok yang terafiliasi dengan agama tertentu, seperti kelompok yang mengaku sebagai penganut ideologi Islam yang keras (Sanaky & Safitri, 2016). Dalam perspektif intelijen, ancaman radikalisme di Indonesia menjadi salah satu prioritas dalam menjaga keamanan nasional. Intelijen mengumpulkan data dan informasi tentang kelompok-kelompok radikal yang berpotensi melakukan aksi kekerasan dan mengidentifikasi ancaman-ancaman yang bisa ditimbulkan (Salamuddin, 2015).

Perkembangan teknologi dan akses informasi yang semakin mudah membuat kelompok radikal dapat dengan mudah mengembangkan jaringan mereka. Mereka dapat melakukan proses rekrutmen dan propaganda melalui internet dan media sosial dengan lebih efektif. Oleh karena itu, tugas intelijen semakin kompleks dan memerlukan strategi dan taktik yang tepat untuk melindungi keamanan nasional.

Selain itu, pengalaman masa lalu seperti kasus Bom Bali pada tahun 2002 dan serangkaian serangan teror di beberapa kota besar di Indonesia menunjukkan bahwa kelompok radikal masih memiliki kemampuan untuk melakukan aksi kekerasan yang merusak stabilitas sosial dan ekonomi di Indonesia.

Dalam artikel ilmiah ini, akan dibahas tentang bagaimana intelijen berperan dalam menangani ancaman radikalisme di Indonesia. Dalam upaya ini, intelijen menggunakan berbagai metode seperti pengumpulan data dan analisis, pengawasan, penggalangan informasi, serta kerjasama dengan lembaga dan organisasi lain yang terkait.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, studi kepustakaan dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari jurnal, buku, regulasi, dan sumber-sumber lain yang relevan terkait radikalisme dan intelejen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut ini adalah *literatur review* dari artikel ilmiah terkait dinamika ancaman dan faktor yang mempengaruhi gerakan Radikalisme di Indonesia. Dinamika keamanan nasional Indonesia sangat beragam dan kompleks. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keamanan nasional Indonesia, termasuk politik, sosial, ekonomi, dan lingkungan strategis (Wingarta, 2016). Berikut adalah beberapa dinamika ancaman keamanan nasional Indonesia yang perlu dipahami:

1. Ancaman Radikalisme

Radikalisme di Indonesia telah menjadi isu yang sangat penting selama beberapa dekade terakhir. Istilah radikalisme umumnya merujuk pada ideologi atau pandangan politik yang radikal, ekstrem, dan seringkali terkait dengan tindakan kekerasan (Abdullah, 2016).

Radikalisme di Indonesia telah ada sejak zaman kolonial Belanda, namun gerakan-gerakan radikal saat itu lebih fokus pada perjuangan kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka, gerakan radikal yang muncul di Indonesia mulai bergeser fokus pada perjuangan ideologis, seperti perjuangan untuk mengubah negara menjadi negara Islam atau negara yang berlandaskan syariah.

Gerakan radikal yang paling awal di Indonesia adalah gerakan Negara Islam Indonesia (NII), diperkirakan muncul pada awal 1949 yang dipimpin oleh Katusuwiryo. Gerakan ini berasal dari kelompok radikal, dan memiliki

tujuan untuk menggulingkan pemerintah Indonesia dan mendirikan negara Islam yang berlandaskan syariah (Ridlo, 2019).

Kemudian gerakan radikal dapat berkembang menjadi gerakan terorisme. Contoh dari fenomena tersebut adalah serangan terhadap jemaah gereja di Surakarta pada tahun 2011 dan serangan bom di sejumlah daerah pada tahun 2018.

Lebih lanjut, dinamika ancaman radikalisme saat ini juga erat kaitannya dengan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang memiliki kecenderungan berideologi radikal dan bertentangan dengan Pancasila seperti HTI dan FPI.

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) berdiri pada tahun 1980-an. HTI merupakan organisasi yang berasal dari Timur Tengah memiliki tujuan untuk menggulingkan pemerintah dan mendirikan negara khilafah. HTI melakukan propagandanya melalui pengajian dan dakwah di berbagai daerah di Indonesia. Pada tahun 2017, pemerintah Indonesia mengeluarkan keputusan untuk membubarkan HTI karena dianggap sebagai organisasi yang merusak keutuhan negara (Arif, 2016).

Kemudian, Front Pembela Islam (FPI) yang didirikan pada tahun 1998, juga menjadi gerakan radikal yang populer di Indonesia. FPI mengusung agenda Islamis dan ingin menerapkan hukum syariah di Indonesia. FPI kerap melakukan aksi-aksi yang kontroversial dan sering kali menggunakan tindakan kekerasan dan intimidasi terhadap kelompok-kelompok yang dianggap tidak sejalan dengan pandangan mereka. Pada bulan Januari 2021, pemerintah Indonesia juga membubarkan FPI karena dianggap meresahkan masyarakat dan tidak memiliki dasar hukum yang kuat (Pratiwi & Sriwartini, 2021).

Ancaman radikalisme merupakan salah satu dinamika keamanan nasional Indonesia yang signifikan dan dapat berpotensi berkembang menjadi ancaman

terorisme. Beberapa kelompok teroris, termasuk Jemaah Islamiyah dan ISIS, telah melakukan serangan teroris di Indonesia dan terus menjadi ancaman bagi keamanan nasional. Pemerintah Indonesia terus menerus memperkuat kemampuan anti-terorisme dan meningkatkan kerjasama internasional untuk mengatasi ancaman terorisme (Salamuddin, 2015).

2. Konflik etnis dan agama

Indonesia adalah negara yang sangat beragam dengan berbagai kelompok etnis dan agama yang berbeda. Beberapa konflik etnis dan agama telah terjadi di Indonesia, dan dapat menjadi ancaman bagi keamanan nasional jika tidak ditangani dengan baik. Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk mengatasi konflik etnis dan agama melalui dialog, pemulihan dan penguatan kebijakan keamanan (Harahap, 2018).

Konflik agama dapat menjadi faktor yang mempengaruhi timbulnya gerakan radikalisme. Konflik agama dapat muncul akibat perbedaan keyakinan atau pandangan yang berbeda antara kelompok atau individu yang berasal dari agama yang berbeda. Konflik agama dapat menciptakan ketidakpuasan, ketidakadilan, dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah atau institusi yang ada, dan dalam beberapa kasus, dapat memicu munculnya gerakan radikal.

Gerakan radikalisme dapat muncul dari kelompok atau individu yang merasa bahwa keyakinan atau pandangan yang mereka anut telah dilecehkan atau diabaikan oleh pihak lain, termasuk oleh pemerintah atau institusi yang ada. Gerakan radikalisme sering kali mencoba untuk mengambil tindakan ekstrem dalam upaya mereka untuk memperjuangkan keyakinan atau pandangan yang mereka anut (Iqbal, 2017).

Dalam konteks agama, gerakan radikalisme dapat muncul dari kelompok

atau individu yang memandang bahwa pemahaman agama yang mereka anut adalah satu-satunya pemahaman yang benar, dan selain itu dianggap sebagai ketidakpercayaan atau penyimpangan. Kelompok atau individu ini dapat merasa memiliki tanggung jawab untuk memperjuangkan pemahaman agama yang mereka anut dan dapat menggunakan tindakan radikal sebagai bentuk perjuangan mereka.

Namun, penting untuk diingat bahwa tidak semua konflik agama mengarah pada gerakan radikalisme. Ada banyak kasus konflik agama yang dapat diatasi melalui dialog dan toleransi antaragama. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk membangun dialog antaragama dan mempromosikan toleransi antaragama sebagai bentuk pencegahan radikalisme.

3. Kejahatan Transnasional

Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki banyak pelabuhan laut dan bandara udara yang ramai. Hal ini menjadi faktor yang mempengaruhi keamanan nasional Indonesia karena memungkinkan terjadinya kejahatan transnasional seperti perdagangan narkoba, perdagangan manusia, dan perdagangan senjata ilegal yang masih berkaitan dengan gerakan radikalisme di Indonesia. Pemerintah Indonesia terus meningkatkan kerjasama internasional untuk mengatasi kejahatan transnasional ini (Gukguk & Jaya, 2019).

Kejahatan transnasional seringkali memiliki motivasi finansial yang kuat, seperti perdagangan narkoba yang menghasilkan keuntungan yang sangat besar. Kelompok-kelompok radikal di Indonesia dapat memanfaatkan keuntungan tersebut untuk mendanai aktivitas mereka. Jaringan yang luas dan kuat, serta sarana yang lengkap, seperti uang, senjata, dan teknologi canggih. Kelompok-kelompok radikal dapat memanfaatkan

jaringan dan sarana tersebut untuk mencapai tujuan mereka.

Beberapa kelompok radikal di Indonesia memiliki ideologi yang sejalan dengan kegiatan kejahatan transnasional, seperti perdagangan senjata atau narkoba. Ideologi tersebut dapat menjadi alasan bagi kelompok-kelompok radikal untuk terlibat dalam kegiatan kejahatan transnasional (Cipto & Iskandar, 2022).

4. Cybersecurity

Dengan semakin berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, keamanan *cybersecurity* menjadi semakin penting. Ancaman *cyber* seperti pencurian data, penggunaan informasi pribadi, dan serangan *cyber* dapat mempengaruhi keamanan nasional Indonesia. Pemerintah Indonesia terus meningkatkan kemampuan *cybersecurity* untuk melindungi infrastruktur kritis dan data pribadi (Rizki, 2022).

Terdapat potensi adanya hubungan antara aspek siber dan gerakan radikalisme di Indonesia. Aspek siber meliputi berbagai hal yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi, seperti internet, media sosial, dan perangkat lunak.

Kelompok-kelompok radikal dapat memanfaatkan media sosial dan situs web untuk menyebarkan propaganda dan mempromosikan ideologi mereka. Mereka dapat menggunakan teknik-teknik yang canggih, seperti pembuatan video atau meme yang menarik perhatian.

Aspek siber dapat memudahkan kelompok-kelompok radikal untuk mengirim dan menerima informasi yang penting bagi gerakan mereka, seperti rencana serangan atau lokasi pertemuan. Mereka dapat menggunakan teknik-teknik enkripsi dan penyamaran untuk menjaga kerahasiaan informasi tersebut (Rozika, 2017).

Kemudian Kelompok-kelompok radikal juga dapat menggunakan aspek siber untuk melakukan penggalangan dana secara online. Mereka dapat menggunakan teknik-teknik yang sulit dilacak, seperti pembayaran dengan *cryptocurrency* atau penjualan produk yang tidak sah. Selain itu, aspek siber dapat memudahkan kelompok-kelompok radikal untuk memberikan pelatihan dan pendidikan kepada anggota baru. Mereka dapat menggunakan teknologi video *conference* atau pengajaran online untuk memberikan pelatihan yang efektif.

Dari beberapa kajian literatur diatas maka radikalisme dapat didefinisikan sebagai suatu pemikiran atau ideologi yang cenderung ekstrem dan membenarkan tindakan kekerasan sebagai cara untuk mencapai tujuan tertentu. Di Indonesia, radikalisme sering kali dikaitkan dengan agama, terutama agama Islam. Beberapa faktor yang memengaruhi terjadinya radikalisme di Indonesia dari aspek agama dan keamanan adalah Ketidakadilan.

Ketidakadilan sosial dan ekonomi. Faktor sosial dan ekonomi yang tidak adil dapat menyebabkan ketidakpuasan dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Hal ini dapat menyebabkan munculnya ideologi yang radikal sebagai cara untuk menyelesaikan masalah sosial dan ekonomi.

Kemudian, Kebijakan Pemerintah. Kebijakan pemerintah yang tidak adil, seperti ketidakadilan dalam pembagian sumber daya, diskriminasi terhadap suatu kelompok tertentu, dan tindakan represif oleh aparat keamanan, dapat memicu rasa tidak puas dan keinginan untuk melakukan perlawanan.

5. Potensi Ancaman Radikal

Potensi ancaman radikal di Indonesia dapat dikategorikan sebagai ancaman internal yang berpotensi

mengganggu stabilitas dan keamanan nasional (Dimiyati *et al.*, 2013). Beberapa potensi ancaman radikal yang perlu diwaspadai adalah:

A. Terorisme

Terorisme adalah ancaman yang sangat serius bagi keamanan nasional Indonesia. Kelompok-kelompok teroris yang berafiliasi dengan organisasi internasional seperti Al-Qaeda dan ISIS sudah menunjukkan kemampuan untuk melakukan aksi kekerasan di Indonesia. Mereka seringkali memanfaatkan situasi politik, sosial, dan ekonomi yang tidak stabil untuk memperluas jaringan dan mendapatkan dukungan.

B. Ekstremisme agama

Ekstremisme agama merupakan ancaman yang tidak kalah serius. Kelompok-kelompok ekstremis agama memiliki pemahaman yang sangat sempit dan radikal terhadap agama dan seringkali membenarkan penggunaan kekerasan sebagai cara untuk mencapai tujuan mereka. Kelompok-kelompok ini dapat mempengaruhi pemikiran masyarakat dan menghasilkan aksi-aksi yang merusak keamanan nasional.

C. Radikalisasi masyarakat

Radikalisasi masyarakat juga merupakan ancaman yang perlu diwaspadai. Radikalisasi dapat terjadi di berbagai sektor, seperti pendidikan, media sosial, dan tempat ibadah. Kelompok-kelompok radikal seringkali menggunakan media sosial untuk mempengaruhi pemikiran masyarakat dan merekrut anggota baru. Mereka juga dapat mengajarkan pemahaman agama yang radikal dan memicu aksi-aksi yang tidak terkontrol.

D. Konflik sosial

Konflik sosial seperti konflik antar etnis dan agama dapat menjadi pemicu tumbuhnya kelompok-kelompok radikal. Konflik sosial dapat menciptakan ketidakpuasan dan ketidakpercayaan

terhadap pemerintah, sehingga memudahkan untuk dipengaruhi oleh kelompok-kelompok radikal.

6. Strategi Intelejen

Dinamika peran intelejen di Indonesia sangat berkaitan dengan kondisi politik dan keamanan dalam negeri, serta hubungan Indonesia dengan negara-negara lain. Adapun Strategi intelijen dalam mengatasi gerakan radikalisme melibatkan beberapa tindakan yang meliputi:

A. Analisis intelijen

Analisis intelijen dilakukan untuk memahami sumber daya, motivasi, dan tujuan kelompok radikal. Dari analisis ini, dapat dikembangkan pemahaman yang lebih dalam mengenai karakteristik kelompok radikal, termasuk struktur organisasi, jaringan, serta taktik dan strategi yang digunakan. Dengan pemahaman yang lebih dalam ini, strategi keamanan dapat disusun dan diimplementasikan dengan lebih efektif (Prayogo *et al.*, 2021).

B. Pengumpulan informasi

Pengumpulan informasi dilakukan untuk mengidentifikasi dan memantau aktivitas kelompok radikal. Informasi ini dapat diperoleh melalui berbagai sumber, termasuk intelijen terbuka, surveilans elektronik, dan pengumpulan data melalui interogasi. Dengan informasi yang tepat dan akurat, keamanan nasional dapat lebih efektif dalam mencegah aksi-aksi radikal yang berbahaya.

C. Pemantauan media sosial

Media sosial seringkali digunakan oleh kelompok-kelompok radikal untuk menyebarkan pesan-pesan yang radikal dan merekrut anggota baru. Oleh karena itu, intelijen perlu memantau aktivitas kelompok radikal di media sosial untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk

mencegah aksi-aksi radikal yang merugikan keamanan nasional.

D. Kerjasama internasional

Kelompok-kelompok radikal seringkali beroperasi secara lintas negara. Oleh karena itu, kerjasama internasional dalam mengatasi gerakan radikalisme sangatlah penting. Melalui kerjasama dengan negara-negara lain, intelijen dapat memperoleh informasi dan memperkuat kerjasama operasional dalam menangani kelompok-kelompok radikal.

E. Program pencegahan

Program pencegahan juga merupakan bagian dari strategi intelijen dalam mengatasi gerakan radikalisme. Program ini meliputi kegiatan yang bertujuan untuk mencegah masyarakat dari terpapar ideologi radikal dan mendorong mereka untuk memilih jalan yang damai. Program ini juga melibatkan penguatan toleransi antar etnis dan agama, penguatan nilai-nilai demokrasi, dan pemberian pelatihan kepada masyarakat dalam mengenali tanda-tanda radikalisme.

Regulasi Radikalisme di Indonesia Indonesia, sebagai negara yang memiliki banyak keragaman agama dan suku bangsa, sering dihadapkan dengan ancaman radikalisme dan terorisme. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia telah membuat berbagai regulasi untuk mengatasi ancaman radikalisme, termasuk di dalamnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2018 tentang Penguatan Pencegahan dan Penanganan Radikalisme. Berikut adalah review ilmiah tentang regulasi radikalisme di Indonesia:

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme merupakan regulasi awal yang dibuat oleh

pemerintah Indonesia dalam rangka mengatasi ancaman terorisme dan radikalisme. Undang-Undang ini memberikan dasar hukum bagi aparat keamanan untuk melakukan tindakan pencegahan dan penindakan terhadap tindak pidana terorisme dan radikalisme. Namun, terdapat kritik bahwa Undang-Undang ini masih terlalu umum dan tidak mengatur secara rinci mengenai pencegahan dan penanganan radikalisme.

Kemudian, Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2018 tentang Penguatan Pencegahan Penanganan Radikalisme merupakan regulasi yang lebih khusus dan terbaru dalam mengatasi ancaman radikalisme di Indonesia.

Peraturan ini memberikan arahan bagi aparat keamanan dan lembaga terkait dalam melakukan pencegahan dan penanganan radikalisme, termasuk melalui pendidikan, pelatihan, dan sosialisasi. Meskipun pemerintah Indonesia telah membuat regulasi-regulasi untuk mengatasi ancaman radikalisme, masih terdapat beberapa kritik dan tantangan dalam implementasinya.

Beberapa kritik mengenai regulasi radikalisme di Indonesia antara lain, masih kurangnya koordinasi antar lembaga dalam melakukan pencegahan dan penanganan radikalisme, masih kurangnya sosialisasi mengenai regulasi tersebut kepada masyarakat, serta masih adanya perbedaan pendapat mengenai definisi radikalisme itu sendiri.

Selain itu, ada juga tantangan dalam mengimplementasikan regulasi tersebut, seperti minimnya anggaran dan sumber daya manusia untuk melakukan pencegahan dan penanganan radikalisme, serta sulitnya mendeteksi dan menangani kelompok radikal yang tersembunyi. Dalam rangka mengatasi kritik dan tantangan tersebut, pemerintah Indonesia perlu meningkatkan koordinasi antar lembaga

dalam mengatasi ancaman radikalisme, meningkatkan sosialisasi mengenai regulasi-radikalisme kepada masyarakat, serta memperkuat sumber daya manusia dan anggaran yang diperlukan untuk melakukan pencegahan dan penanganan radikalisme.

SIMPULAN

Berdasarkan ulasan dan masalah terkait potensi ancaman radikal dapat disimpulkan bahwa ancaman radikalisme merupakan salah satu faktor yang dapat membahayakan keamanan nasional suatu negara. Program-program yang berfokus pada pengentasan kemiskinan, pendidikan, dan penguatan toleransi antar etnis dan agama dianggap dapat mengurangi tingkat ketidakpuasaan masyarakat terhadap pemerintah.

Kemudian, diperlukan peran intelijen yang efektif dan efisien dalam mencegah dan menanggulangi ancaman tersebut. Intelijen perlu mengalokasikan sumber daya secara tepat dan bekerja sama dengan pihak keamanan lainnya untuk mengembangkan strategi yang efektif dalam menghadapi ancaman radikalisme. Selain itu, penting bagi intelijen untuk memastikan bahwa tindakan mereka selalu sesuai dengan hukum dan etika yang berlaku serta menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga intelijen.

Kemudian, dalam mengatasi gerakan radikalisme, strategi intelijen harus diintegrasikan dengan strategi keamanan nasional yang lain. Hal ini memungkinkan penanganan radikalisme menjadi lebih efektif dan terkoordinasi. Oleh karena itu pemerintah dan lembaga intelijen perlu terus meningkatkan kapasitas dan kesiapan dalam mengatasi ancaman radikalisme.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. (2016). Gerakan Radikalisme Dalam Islam: Perspektif Historis. *10(1)*, 1-28.
- Arif, S. (2016). Pandangan Dan Perjuangan Ideologis Hizbut Tahrir Indonesia (Hti) Dalam Sistem Kenegaraan Di Indonesia. *Aspirasi, Vol. 7 No*, 1-12.
- Cipto, T., & Iskandar. (2022). Upaya Pemberantasan Islam Radikalisme Dan Pendanaan Terorisme Di Indonesia. *Khazanah Multidisiplin, 3(2)*, 117-138.
- Dimiyati, K., BusjroMuqoddas, M., & Wardiono, K. (2013). Radikalisme Islam Dan Peradilan: Pola-pola Intervensi Kekuasaan dalam Kasus Komando Jihad di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum, 13(3)*, 379-391.
- Gukguk, R. G., & Jaya, N. S. P. (2019). Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnasional Organized Crime. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 1(3)*, 337-351. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.337-351>
- Harahap, S. (2018). Konflik Etnis Dan Agama Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama (Jisa), 1(2)*, 1. <https://doi.org/10.30829/jisa.v1i2.5096>
- Iqbal, I. (2017). Konflik Etno-Religius di Indonesia Kontemporer dalam Pandangan Orde Baru. *Tasamuh: Jurnal Studi Islam, 9(1)*, 1-24. http://ejournal.stain.sorong.ac.id/indeks.php/ta_samuh
- Nurlaila. (2018). Radikalisme di Kalangan Terdidik. *IQ (Ilmu Al-Qur'an): Jurnal Pendidikan Islam, 1(02)*, 266-285. <https://doi.org/10.37542/iq.v1i02.19>
- Pratiwi, E. N., & Sriwartini, Y. (2021). Pemberitaan Pembubaran Organisasi Front Pembela Islam. *Jurnal Sosial Dan Humaniora, 6(1)*, 1. <https://doi.org/10.47313/ppl.v6i1.1109>
- Prayogo, H., Sulistiyanto, & Pedrason, R. (2021). Implementasi Program Kewaspadaan Dini Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Dalam Mengatasi Paham Radikalisme Di Wilayah Kota Depok. *7(1)*, 53-69.
- Ridlo, M. (2019). Negara Islam Indonesia Dan Kartosuwiryo. *HUMANISTIKA : Jurnal Keislaman, 5(2)*, 134-155. <https://doi.org/10.36835/humanistika.v5i2.45>
- Rizki, M. (2022). Perkembangan Sistem Pertahanan/Keamanan Siber Indonesia dalam Menghadapi Tantangan Perkembangan Teknologi dan Informasi. *Politeia: Jurnal Ilmu Politik, 14(1)*, 54-62. <https://doi.org/10.32734/politeia.v14i1.6351>
- Rozika, W. (2017). Propaganda dan Penyebaran Ideologi Terorisme Melalui Media Internet (Studi Kasus Pelaku Cyber Terorisme oleh Bahrun Naim). *Jurnal Ilmu Kepolisian, 089(2005)*, 122-134.
- Salamuddin, I. P. B. (2015). Meningkatkan Penanggulangan Radikalisme guna Mewujudkan Sistem Keamanan Nasional dalam Rangka Ketahanan Nasional. *Jurnal Kajian Lemhannas RI, 21(maret)*, 4-11.
- Sanaky, H. A., & Safitri, E. (2016). Radikalisme Agama Dalam Perspektif Pendidikan. *Millah, XIV(2)*, 135-146. <https://doi.org/10.20885/millah.volxiv.iss2.art7>
- Wingarta, P. S. (2016). Rejuvenasi bhinneka tunggal ika (pendekatan kewaspadaan nasional). *Jurnal Kajian Lemhannas RI, 1-83*.